Jurnal Sustainable

Volume 6 Number 2 2023, 797-802
E-ISSN: 2655-0695
DOI:https://doi.org/ 10.32923/kjmp.v6i2.4216

Masyarakat Madani dalam Filsafat Pendidikan Barat dan Islam

Syarifah[1*], Bambang Utomo[2], Abdul Haris[3], Rosichin Mansur[4]

Abstrak

Populasi keseluruhan di negara-negara Barat atau populasi keseluruhan di dunia Islam, merupakan subjek yang terus menjadi perbincangan banyak pihak. Pembicaraan mengenai gagasan ini mengalami pemulihan setelah runtuhnya Persatuan Soviet. Selain itu, masyarakat yang bijaksana dalam banyak kasus diagungkan sebagai sebuah kekhasan mendasar, namun juga memadai untuk siklus demokratisasi dan Kepastian ide.Hal ini tidak perlu lagi dibahas dalam demokratisasi. Terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat umum sering kali berada di posisi yang berlawanan dengan kekuasaan negara dan masyarakat politik, tugas utama negara harus bersifat memaksa dengan asumsi tugas masyarakat umum berhasil dalam menjaga kebebasan dasar dan peluang individu dari masyarakat umum. Selain itu, tanpa kekuasaan negara, masyarakat umum mungkin dapat menimbulkan konflik yang penuh pertimbangan karena isu-isu etnis, ketat, dan berbasis kelas. Perlu diperhatikan bahwa masyarakat umum tidak dapat menggantikan pemerintah. Dalam situasi Indonesia, perubahan saat ini tampaknya tidak menemukan strukturnya, pengalaman pertikaian bersama yang progresif, munculnya kelompok-kelompok masyarakat tidak beradab yang berbasis sosial dan ketat yang berperan penting dalam meningkatkan meningkatnya kejahatan, mempertimbangkan kembali gagasan tentang kesamaan. masyarakat adalah percakapan yang tidak dapat diperiksa.

Kata kunci: masyarakat, filsafat pendidikan barat

History:
Received : 19 Nov 2023
Revised : 25 Nov 2023
Accepted : 30 Nov 2023
Published : 31 Dec 2023
[12]Universitas Darussalam Gontor
[3]Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
[4]Universitas Islam Malang
*Author Correspondent: syarifah@unida.ac.id

Publishers: LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under aCreative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Kebangkitan masyarakat umum saat ini tampaknya terkait erat dengan tradisi filosofis Barat masa kini. Kehadiran faktor-faktor baru yang mendasar, seperti Renaisans, menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan praktik liberal Barat dalam menguasai masyarakat umum. Kita bisa melihat sejumlah komponen pokok yang memberikan dasar pemikiran yang khas pada pemahaman mutakhir masyarakat umum.

Dalam praktik cara berpikir Yunani kuno, Aristoteles adalah tokoh awal yang ikut merenungkan gagasan mendasar tentang masyarakat umum, mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk politik (zoon politicoon = makhluk politik) dan polis adalah struktur terbaik yang mana tujuan normal manusia dapat dipahami. Dalam situasi seperti ini, pemahaman politik wilayah lokal (politicon Coinonema) mendekati pemahaman societas civilis. Keduanya bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang dikelola dengan peraturan sebagai tempat kepentingan umum. Dalam masyarakat seperti ini, peluang harus diakui di arena terbuka. Dengan demikian, polis (negara-kota) merupakan tempat persilangan kebutuhan kepentingan publik dengan gagasan kemajuan manusia, sehingga substansinya tidak sepenuhnya diselesaikan oleh asosiasi politiknya.

Membahas masyarakat awam dalam kondisi seperti sekarang ini merupakan kebutuhan yang tidak perlu diperdebatkan dan harus segera disadari. Hal ini disebabkan oleh budaya masa kini yang berbeda dan sarat dengan kepentingan individu dan kelompok. Dengan cara ini, menurut Thohir Luth, masyarakat umum adalah jawaban yang tenang terhadap perbedaan.

Metode

Pemeriksaan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Exploration). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, data dan berbagai macam informasi yang terkandung dalam tulisan. Dengan mengungkapkan pemeriksaan semacam ini, konsentrasi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam eksplorasi ini menjadi semakin jelas. Mengenai sumber, karena artikel ini merupakan survei penulisan, maka hal-hal yang dapat dijadikan sumber dibagi menjadi dua, yaitu esensial dan opsional. Informasi penting adalah buku, buku harian, pengumuman dan karya logis yang berhubungan dengan masyarakat umum. Sementara informasi penunjang berupa buku-buku yang masih dipandang dapat diterapkan pada penelitian eksplorasi.

Metodologi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah metodologi filosofis. Metodologi filosofis digunakan untuk membentuk gagasan-gagasan pokok yang hakikatnya jelas. Sementara itu, metode pengumpulan informasi menggunakan prosedur dokumentasi. Prosedur dokumentasi merupakan strategi pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mencari informasi tentang faktor-faktor penelitian dari berbagai jenis dokumentasi, baik berupa catatan, catatan, buku, makalah, majalah, buku harian, dan lain-lain. Teknik pemeriksaan yang digunakan adalah investigasi isi.

Hasil dan Diskusi

Konsep Masyarakat Madani dalam Pendidikan.

Menurut beberapa ahli, masyarakat awam mempunyai beberapa sentimen, antara lain: Ismail SM mengungkapkan bahwa masyarakat awam adalah lingkaran partisipasi sosial yang berada di luar jangkauan pengaruh Pemerintah dan model yang dibuat dalam keadaan sosial yang paling alamiah seperti keluarga, afiliasi yang disengaja, perkembangan sosial dan berbagai jenis iklim korespondensi. antar individu daerah setempat (Qodri, 2004).

Dalam Bahasa *Civil Society*. Kata common sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya umum atau memanusiakan. Istilah masyarakat umum merupakan penafsiran masyarakat umum atau masyarakat yang terpelajar, dan itu menyiratkan masyarakat yang tercerahkan (Ismail, 2000). Masyarakat madani (*civil society*) merupakan masyarakat yang membangun, menghayati, dan memaknai kehidupannya. Kata common sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya umum atau memanusiakan. Istilah masyarakat umum merupakan penafsiran masyarakat umum atau masyarakat yang terpelajar, dan itu menyiratkan masyarakat yang tercerahkan (Azizy, 2004). *Civil Society* adalah organisasi sosial yang akan melindungi warganya dari indikasi kekuasaan negara yang tidak berguna. Faktanya, masyarakat secara keseluruhan dapat dipandang sebagai pendukung utama kehidupan politik yang berbasis di mana-mana. Karena masyarakat melindungi penduduknya saat berhubungan dengan negara, namun juga merencanakan dan menyuarakan aspirasi daerah setempat. (Dawam, 2000)

Masyarakat Madani dan Pendidikan Barat dan Islam

Common society dalam bahasa Inggris dikenal dengan masyarakat normal, yang dicetuskan mulanya oleh Cicero dalam logika berpikir politiknya yang cukup lama dalam Bahasa *social order civilis* yang tidak dapat dipisahkan dari negara. Pada gilirannya, istilah masyarakat umum telah dianggap sebagai asosiasi lokal yang pada dasarnya digambarkan oleh tingkat keikhlasan dan otonomi yang tinggi terhadap negara dalam hubungan dengan kualitas dan standar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat umum adalah gagasan tentang masyarakat umum yang dapat mendorong dirinya sendiri melalui kebebasan bertindak dalam ruang yang berada di luar jangkauan negara untuk melakukan mediasi. Hal ini terkait erat dengan gagasan masyarakat umum dengan gagasan sistem pemerintahan mayoritas dan demokratisasi, karena pemerintahan dengan pemerintahan mayoritas hanya mungkin untuk mengisi masyarakat umum dan masyarakat umum hanya menciptakan iklim berbasis popularitas. Pada awalnya, perkembangan hierarki mencakup kaum buruh muda dan kaum terpelajar dan juga dipisahkan oleh meningkatnya kesadaran buruh

akan kebutuhan mereka untuk berusaha mencapai posisi yang lebih baik. Pada tahun 1980, terjadi perubahan politik yang sangat mendasar yang dipandang sebagai jalan menuju demokratisasi dan perbaikan masyarakat madani di Indonesia. Mei 1998 dan disusul oleh perubahan-perubahan dalam persekutuan dan permasalahan perundang-undangan yang sangat penting dan berpotensi untuk terciptanya masyarakat madani yang lebih baik. Dalam pelajaran Islam, asal muasal istilah masyarakat madani selain menyinggung gagasan masyarakat umum, juga didasarkan pada gagasan wilayah kota Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat awam juga menyinggung gagasan *tamadhun* (masyarakat bersosialisasi) yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, dan gagasan *Al Madinah al Fadhilah* (Madinah sebagai Negara Utama) yang disampaikan oleh pemikir Al-Farabi pada Abad Pertengahan. Sederhananya, masyarakat madani adalah istilah untuk menggambarkan tipe masyarakat yang ideal atau idealis. Masyarakat umum merupakan gambaran visi yang diharapkan setiap daerah dalam membentuk masyarakat (Sahlia, 2022). Ada dua tatanan sosial umum dalam sejarah yang dilaporkan sebagai tatanan sosial umum, khususnya: pertama, Masyarakat dari Negri Saba', khususnya masyarakat madani pada masa Nabi Sulaiman; begitu pula warga Madinah pasca kesepakatan, penataan Madinah antara Rasullullah SAW dengan kaum muslimin dan penduduk Madinah yang beragama Yahudi serta Watsani dari suku Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah memuat kesepahaman antara ketiga komponen masyarakat untuk saling membantu, mewujudkan keselarasan dalam beraktivitas masyarakat, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasullullah SAW sebagai pionir yang berserah diri sepenuhnya pada pilihannya, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama, serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Masyarakat biasa tidak akan muncul tanpa orang lain. Ia membutuhkan komponen sosial yang penting untuk memenuhi permintaan masyarakat umum. Beberapa komponen utama yang digerakkan oleh masyarakat umum adalah:

1. *Free Public Sphere* (Adanya Wilayah Publik yang Luas) merupakan ruang terbuka bebas sebagai sarana untuk menawarkan sudut pandang kepada penghuni. Di ruang publik ini, semua warga mempunyai strata, porsi dan hak yang sama untuk menyelesaikan pertukaran social, ekonomi dan politik tanpa rasa khawatir atau bahaya dari kekuasaan di luar masyarakat madani.

   Secara hipotetis, arena Terbuka Bebas dapat didefinisikan sebagai suatu area di mana setiap individu sebagai penduduk mempunyai akses penuh terhadap setiap gerakan publik. Warga berhak bebas bergerak dalam menawarkan sudut pandang, bermitra, mengumpulkan dan mendistribusikan kepentingan public. Perjuangan untuk menciptakan ruang terbuka bebas adalah hal yang penting untuk memahami masyarakat politik tingkat tinggi yang kebal terhadap otoritas negara. Sebab, hanya di ruang terbuka yang bebas aktivitas politik sejatinya bisa benar-benar mengangkat keluhuran budi umat manusia. Sebagai suatu hal yang esensial, untuk membangun dan mengakui kebersamaan dalam masyarakat luas, ruang publik merupakan salah satu bagian yang perlu diperhatikan.
2. Demokrasi. Pemerintahan dengan kekuasaan mayoritas merupakan hal yang penting bagi kehadiran masyarakat umum yang sesungguhnya. Tanpa sistem pemerintahan mayoritas, masyarakat awam tidak akan bisa dipahami. Sistem pemerintahan mayoritas akan berjalan dengan buruk jika tidak mendapatkan bantuan yang tulus dari masyarakat. Pada umumnya, mayoritas peraturan pemerintah merupakan permintaan sosial dan politik yang dimulai kemudian diselesaikan untuk penduduk (Burhanuddin, 2023). Pemerintahan mayoritas adalah sebuah substansi yang berfokus pada pembicaraan masyarakat umum, di mana warga mempunyai kesempatan penuh guna melakukan aktivitas sepanjang hidup, termasuk interaksi iklim sosial mereka.

   Azyumardi Azra menambahkan, pemerintahan mayoritas merupakan tahapan yang mempertimbangkan penguatan daerah dalam berbagai bidang kehidupan, politik, namun juga ramah, sosial, pendidikan, keuangan dan lain-lain. Lebih lanjut beliau menyatakan

bahwa dalam situasi ini, demokratisasi dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki diri, bukan menganggap demokratisasi sebagai pertahanan dalam perjuangan melawan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan yang didominasi oleh mayoritas sekali lagi mengambil peran penting dalam membentuk masyarakat umum.

3. Toleransi. Ketahanan adalah mentalitas yang saling menghargai tanpa henti terhadap perbedaan penilaian. Ketahanan adalah mentalitas yang terbentuk dalam masyarakat umum untuk menunjukkan rasa hormat yang sama tanpa henti terhadap aktivitas orang lain. Dengan cara yang sama, pemahaman tentang ketahanan ini tidak berarti memercayai pola pikir orang lain, terlepas dari apakah kita menganggap ada sesuatu yang tidak benar.
4. Pluralisme. Mayoritas atau pluralisme adalah hal lain yang penting bagi masyarakat umum. Pluralisme tidak hanya sekedar dipandang sebagai sebuah mentalitas yang harus memahami dan mengakui faktor-faktor sosial yang berbeda, namun harus disertai dengan sikap tulus untuk menerima situasi kontras sebagai sesuatu yang alami dan keikhlasan Tuhan yang memberikan insentif positif bagi kehidupan individu.
   Pluralisme adalah hubungan sejati antara keberagaman dan kewajiban kesopanan. Pluralisme erat kaitannya dengan perlawanan terhadap orang lain, yang memang diperlukan dalam keberadaan budaya pluralistik.
5. Hak-hak sipil. Hak-hak sipil adalah adanya keseimbangan dan sirkulasi yang sesuai dari kebebasan dan komitmen setiap penduduk yang mencakup seluruh aspek kehidupan: aspek keuangan, masalah pemerintahan, informasi dan pintu terbuka yang menakjubkan. Dalam arti lain, hak-hak sipil merupakan akhir dari pemaksaan model bisnis dan sentralisasi suatu bagian kehidupan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau golongan tertentu. Satu lagi prasyarat mendasar untuk membentuk masyarakat umum adalah hak-hak sipil. Hak-hak sipil disini diartikan sebagai keadilan yang harus dilihat oleh masyarakat untuk diberikan oleh negara baik dalam bidang keuangan, masalah pemerintahan dan keistimewaan lainnya. Lebih jauh lagi, dalam istilah yang lebih mudah, hak-hak sipil, yang tersirat dalam penyebaran hak-hak istimewa dan komitmen-komitmen yang masuk akal dan relatif, segala sesuatunya setara, mencakup seluruh aspek kehidupan.

Penegakan masyarakat madani dalam Persepktif Pendidikan di Indonesia.

Kemungkinan masyarakat awam baru mulai terkenal di Indonesia sekitar pertengahan tahun 90an. Faktanya, gagasan ini mulai berkembang di Eropa Barat dengan akar awal yang dapat diverifikasi dalam kemajuan Barat pada abad kedelapan belas, atau saat ini berusia sekitar 250 tahun. John Locke dan zaman-zaman yang dihasilkannya memanfaatkan pemikiran maju Masyarakat Umum untuk menyelesaikan penyelidikan tuntutan sosial yang muncul menjelang akhir abad ketujuh belas

Masyarakat yang bijaksana diharapkan memiliki sifat-sifat; Komprehensif, Supermasi, Keabadian, Penyebaran kekuatan yang setara, Integritas dan untuk keuntungan jangka panjang, Mencapai kebenaran umum, Keseimbangan strategi umum, Instrumen luar, Tidak berkomunikasi untuk keuntungan, dan Pintu terbuka yang setara dan adil bagi setiap penduduk. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah pemikiran filosofis dan hipotetis sekolah Islam sebagai kaidah-kaidah yang melandasi pelaksanaannya dengan memperhatikan iklim masyarakat pada umumnya, sehingga pelatihan dapat diterapkan pada keadaan dan kualitas sosio-sosial masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk mengharapkan adanya perubahan terhadap masyarakat umum, maka sekolah Islam harus mampu menjawab perubahan tersebut. Demikian pula, untuk menciptakan masyarakat bersama, salah satu perubahan dalam pendidikan adalah dengan mendemokratisasi pendidikan. Inti dari demokratisasi pendidikan adalah untuk melahirkan lulusan yang mandiri, berpikir fundamental dan sangat terbuka terhadap perspektif dan praktik kekuasaan mayoritas.

Penyelenggaraan demokratisasi pendidikan di kalangan wali kelas harus dapat membawa siswa untuk melihat nilai dari kapasitas pendamping dan pendidik, kemampuan finansial pendamping dan instruktur, gaya hidup pendamping dan pendidik, dan berbagai kelompok mayoritas lainnya. Selain itu, implementasinya dalam PBM juga dapat dilakukan dengan

menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang sedang berlangsung oleh siswa dan masyarakat (sadar), tanpa menghapuskan hari kemarin. Misalnya, jika siswa sebagian besar berasal dari penggarapan yayasan daerah, maka orang tua atau keluarganya biasanya akan meminta hasil dari pendidikan anak-anaknya untuk peningkatan efisiensi produk-produk pertanian. Begitu pula jika sebagian besar mahasiswanya berasal dari yayasan nelayan setempat, pengepul, atau pihak lain yang mempunyai kebutuhan berbeda-beda.Selama menunjukkan pragmatik, guru tidak memiliki model bisnis yang mengesankan dalam penemuan data. Syafaat instruktur adalah sebagai dinamisator, fasilitator, perantara dan pemberi inspirasi. Sebagai fasilitator, guru harus memberikan pintu terbuka yang berharga kepada siswa untuk mencoba menemukan sendiri arti penting dari data yang diperolehnya. Sebagai seorang dinamisis, guru harus berupaya membangun lingkungan PMB yang dialogis dan berbasis proses. Sebagai perantara, guru hendaknya memberikan tanda atau judul dengan tujuan agar siswa diperbolehkan untuk belajar. Sebagai inspirasi, guru harus terus menerus memberikan hiburan agar siswanya semangat dalam berpikir. Dalam pendidikan profesional yang membumi, dirasakan bahwa kelemahan pendidikan hanya terletak pada perencanaan tenaga kerja yang masuk akal. Jika demikian, sekolah hanya akan menjadikan negara pekerja terampil dan bukan negara sarjana. Namun guru tidak hanya menerapkan pendidikan membumi tetapi juga pendidikan skolastik yang dipercayakan untuk menjadikan sarjana publik hipotetis. Selain tidak hanya bersifat hipotetis, harus ada aktivitas yang tulus dari konsekuensi sudut pandangnya. Oleh karena itu, harus ada keselarasan antara kemampuan fungsional dan kapasitas yang diperhitungkan agar tercipta SDM yang berwawasan nasional dan internasional, dan sekaligus berkiprah di tingkat lokal.

Korespondensi dalam demokratisasi pendidikan harus terjadi kesana-kemari dan tidak hanya bersifat satu arah, yaitu antara guru dengan anggota (*top down*), namun juga harus seimbang, yaitu antara guru dengan siswa juga antar interpersonal siswa(organisasi). Dengan model korespondensi *top down*, ada kecenderungan guru merasa lelah sedangkan siswa tidak mempunyai ide sama sekali, laten, kelelahan, mengantuk, yang lebih parahnya lagi, siswa tidak mendapat data baru. Instruktur adalah sumber utama pembelajaran dengan posisi yang sangat penting dan percaya bahwa otak siswa yang menyerupai tong kosong dapat diisi dengan data yang berbeda dari mereka. Sebaliknya dengan model korespondensi organisasi, aset pembelajaran terletak pada guru dan juga pada siswa. Instruktur cenderung tidak merasa lelah, siswa memahami dengan memanfaatkan wawasannya sendiri, dinamis, gembira, dan kaya dengan data baru. Meskipun demikian, sejauh ini tampaknya pengajaran berpegang pada standar yang disusun berdasarkan topik yang menyulitkan siswa dengan data mental dan mesin yang terkadang tidak relevan terhadap kebutuhan, zaman dan tingkat perkembangan mental siswa. Pelatihan termasuk ruang mental telah diselesaikan dengan pertimbangan yang luar biasa. Tampilan para eksekutif saat ini memberikan kesan terlalu condong pada ilmu pengetahuan dan inovasi, termasuk terlalu terkoordinasinya gerakan-gerakan yang sebenarnya. Dengan pedoman ini dapat melahirkan lulusan yang tajam, cerdik dan berbakat; Meski begitu, ilmu dan wawasan keilmuan tidak diimbangi dengan kemampuan mengapresiasi siapa pun secara hakiki. Keadaan kekinian ini terjadi karena tidak adanya penghargaan terhadap ruang penuh perasaan. Meskipun ruang penuh perasaan memainkan peran yang sama pentingnya dalam membentuk perilaku siswa. Saat ini, dalam mendukung terlaksananya demokratisasi pendidikan, telah tiba peluang untuk mengubah aturan topik yang diatur ke dalam situasi pembelajaran. Arahan pendidikan yang ditempatkan pada siswa lebih menekankan pada pengembangan, peningkatan dan kebutuhan siswa secara keseluruhan, baik secara tulus maupun intelektual. Dalam situasi ini, wawasan otak sangatlah penting, namun kemampuan untuk memahami individu secara lebih mendalam juga tidak kalah pentingnya.

Sumbangan Filsafat Pendidikan Barat dan Islam bagi tegaknya Masyarakat Madani.

Di lingkungan PBM dengan aturan mayoritas, terdapat populisme (keadilan atau keseimbangan dalam harmoni) di antara guru dan siswa. Pengajaran tidak perlu bersifat top down namun diimbangi dengan base up sehingga tidak ada beban kehendak pendidik kecuali akan

adanya kesepahaman antara kedua pelaku dalam menentukan sasaran, materi, media, PBM, dan penilaian hasil belajar. Demikian pula, ada persyaratan untuk pelatihan yang didasarkan pada budaya, khususnya pendidikan yang tidak meninggalkan akar yang dapat diverifikasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sejarah sosial suatu negara. Pelatihan ini dipercaya dapat membentuk individu yang berkarakter, percaya diri dan tidak takut untuk membangun kemajuan dalam memandang kebudayaan.

Kesimpulan

Kebangkitan masyarakat umum saat ini tampaknya terkait erat dengan tradisi filosofis Barat masa kini. Kehadiran faktor-faktor baru yang mendasar, seperti Renaisans, menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan praktik liberal Barat dalam menguasai masyarakat umum. Kita bisa melihat sejumlah komponen pokok yang memberikan dasar pemikiran yang khas pada pemahaman mutakhir masyarakat umum. Dalam praktik cara berpikir Yunani kuno, Aristoteles adalah tokoh awal yang ikut merenungkan gagasan mendasar tentang masyarakat umum, mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk politik (zoon politicoon = makhluk politik) dan polis adalah struktur terbaik yang mana tujuan normal manusia dapat dipahami. Dalam situasi seperti ini, pemahaman politik wilayah lokal (politicon Coinonema) mendekati pemahaman societas civilis.

Referensi

Busyairi, Ahmad dan Azharuddin Sahil. Tantangan Pendidikan Islam. Yogyakarta: LPM UII, 2007.

Charis, Irfan dan Mohamad Nuryansah. "Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Madani Indonesia" dalam Jurnal Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 7 No. 2 Desember 2015.

Esposito, John L. Islam dan Politik. terj. Joesoeb Souyb. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

Fauzi, A. Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual : Suatu Telaah Diskursif. Kediri: Empirisma, 2015.

Hamim, Thoha. Islam dan Civil Society (Masyarakat Madani). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Izzah, Ismatul. "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani" dalam Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2018.

Luth, Thohir. Masyarakat Madani Solusi Damai Dalam Perbedaan. Jakarta: Mediacita, 2002. Madjid, Nurcholish. Islam, Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Cet. IV. Jakarta: Paramadina, 2000.

Achwan, Roihan. Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 1 Tahun 2001

Amstrong, Karen. Muhammad Prophet For Our Time. terj. Yuliani Liputo. Jakarta : Mizan, 2007.

Azizi, A. Qodri Abdillah. "Masyarakat madani Antara Cita dan Fakta: Kajian Historis-Normatif" dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Azra, Azyumardi. Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000

Baharuddin dkk. Dikotomi Pendidikan Islam: Historisitas dan Implikasi Pada Masyarakat Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Bellah, Robert N, Ed. Beyond Belief. New York: Harper And *Row, Edisi Paperblack, 2004*